



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 1459-1466

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Model Integratif Kegagalan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Daerah

Najarudin, Jamaluddin Hos

Prodi S3 Ilmu Manajemen, Program Pascasarjana Manajemen, Universitas Halu Oleo

najarudinwamelai1987@gmail.com, jhosmard@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor kegagalan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Muna. Metode penelitian adalah pendekatan kualitatif melalui systematic literature review terhadap 20 publikasi ilmiah periode 2017–2025. Analisis dilakukan dengan teknik tematik untuk mengidentifikasi pola utama penyebab kegagalan implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan lima faktor dominan, yaitu keterbatasan sumber daya, fragmentasi tata kelola, ketidaksesuaian desain kebijakan dengan konteks lokal, kelemahan instrumen kebijakan, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan diperkuat oleh kondisi kontekstual seperti karakteristik wilayah kepulauan dan kapasitas institusional daerah. Selain itu, penelitian menemukan bahwa adanya hambatan birokratis dan kurangnya koordinasi lintas sektor memperparah situasi. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa kerangka integratif dalam memahami kegagalan implementasi kebijakan secara komprehensif. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan kebijakan yang adaptif, kontekstual, dan partisipatif guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di daerah. Dengan kerangka ini, pihak berwenang dapat merumuskan strategi yang lebih responsif dan berkelanjutan, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Lebih jauh, penelitian ini juga menekankan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan transparansi, serta inovasi dalam mekanisme pengawasan agar kebijakan tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik nyata. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam pengelolaan sampah.

Kata kunci: Kebijakan Publik, Pengelolaan Sampah, Implementasi Kebijakan, Tata Kelola Daerah, Partisipasi Masyarakat

1. Latar Belakang

Permasalahan pengelolaan sampah merupakan salah satu isu krusial dalam administrasi publik, khususnya pada level pemerintahan daerah yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap pelayanan publik lingkungan. Dalam berbagai konteks global, kegagalan implementasi kebijakan pengelolaan sampah menjadi fenomena yang berulang dan kompleks, tidak hanya terjadi di negara berkembang tetapi juga di negara dengan sistem tata kelola yang relatif maju. Literatur menunjukkan bahwa kegagalan tersebut sering kali bersumber dari ketidaksesuaian antara desain kebijakan dengan kapasitas lokal, keterbatasan sumber daya, serta lemahnya struktur tata kelola yang mendukung pelaksanaan kebijakan (Artha et al., 2023; Trinh et al., 2021; Mukhtar et al., 2016; Bahn-Walkowiak & Wilts, 2017). Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberadaan kebijakan formal tidak secara otomatis menjamin keberhasilan implementasi di tingkat lokal. Sebaliknya, implementasi kebijakan justru menjadi tahap paling kritis yang menentukan apakah tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif. Dalam konteks ini, pengelolaan sampah sebagai bagian dari pelayanan publik memerlukan pendekatan yang tidak hanya teknokratis, tetapi juga institusional dan partisipatif. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan menjadi sangat penting untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik di sektor lingkungan.

Lebih lanjut, studi tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah menekankan pentingnya keselarasan antara instrumen kebijakan dan konteks implementasinya. Ketidaktepatan dalam pemilihan instrumen kebijakan, seperti dominasi pendekatan sukarela tanpa dukungan regulasi yang kuat, dapat menyebabkan kebijakan tidak berjalan efektif di lapangan (Jones & Head, 2023; Cai & Chen, 2024). Selain itu, kombinasi instrumen kebijakan yang tidak terintegrasi sering kali menghasilkan kebingungan dalam pelaksanaan serta lemahnya penegakan aturan. Hal ini menunjukkan bahwa desain kebijakan harus mempertimbangkan tidak hanya tujuan normatif, tetapi

juga aspek implementatif yang realistis dan dapat dijalankan oleh aktor lokal. Dalam banyak kasus, kegagalan implementasi terjadi karena kebijakan dirancang secara sentralistik tanpa mempertimbangkan variasi kondisi lokal. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan cenderung tidak adaptif terhadap kebutuhan dan kapasitas daerah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana desain kebijakan berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi, khususnya dalam sektor pengelolaan sampah.

Dari perspektif tata kelola, implementasi kebijakan pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh dinamika multi-level governance yang melibatkan berbagai aktor dan tingkat pemerintahan. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara sektor publik dan swasta, menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan (Cai & Chen, 2024; Olukanni & Nwafor, 2019; Yandra et al., 2020). Namun, dalam praktiknya, koordinasi ini sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan kepentingan, keterbatasan kapasitas, serta kurangnya mekanisme koordinasi yang efektif. Fragmentasi tata kelola ini menyebabkan kebijakan tidak dapat diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan. Selain itu, keterlibatan sektor swasta melalui skema kemitraan publik-swasta (PPP) juga menunjukkan hasil yang beragam, tergantung pada kualitas desain kontrak dan mekanisme pengawasan yang diterapkan. Tanpa tata kelola yang kuat, keterlibatan aktor non-pemerintah justru dapat memperburuk kondisi implementasi kebijakan. Oleh karena itu, analisis terhadap tata kelola menjadi penting dalam memahami kegagalan implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Dalam konteks negara berkembang, termasuk Indonesia, tantangan implementasi kebijakan pengelolaan sampah semakin kompleks karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Keterbatasan anggaran, kurangnya infrastruktur, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan (Bulqiyah, 2023; Trinh et al., 2021; Olukanni & Nwafor, 2019). Studi kasus di berbagai daerah menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah dirumuskan dengan baik, implementasinya sering kali terhambat oleh kurangnya dukungan sumber daya yang memadai. Selain itu, lemahnya kapasitas institusional juga menyebabkan rendahnya efektivitas dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada kualitas desain kebijakan, tetapi juga pada kesiapan sumber daya yang mendukungnya. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor sumber daya menjadi bagian penting dalam kajian kegagalan implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Selain faktor kelembagaan dan sumber daya, partisipasi masyarakat juga memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Literatur menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi salah satu penyebab utama kegagalan kebijakan (Lee & Jung, 2018; Salsabila et al., 2023). Tanpa dukungan masyarakat, kebijakan yang dirancang dengan baik pun tidak akan berjalan efektif di lapangan. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan menjadi sangat penting. Namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat sering kali masih bersifat simbolik dan belum terintegrasi secara substantif dalam proses kebijakan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep partisipasi yang diidealkan dengan realitas implementasi di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana peran masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

Dalam perspektif komparatif, berbagai studi lintas negara menunjukkan bahwa kegagalan implementasi kebijakan pengelolaan sampah memiliki pola yang relatif serupa, meskipun terjadi dalam konteks yang berbeda. Faktor-faktor seperti ketidaksesuaian antara kebijakan dan konteks lokal, lemahnya koordinasi, serta keterbatasan sumber daya menjadi penyebab utama kegagalan di berbagai negara (Pereira et al., 2020; Bahn-Walkowiak & Wilts, 2017). Namun, terdapat juga variasi dalam tingkat keberhasilan implementasi yang dipengaruhi oleh faktor kontekstual, seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang bersifat universal tidak selalu efektif dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah. Sebaliknya, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap kondisi lokal. Oleh karena itu, kajian literatur yang mengintegrasikan berbagai temuan dari berbagai konteks menjadi penting untuk memahami dinamika kegagalan implementasi kebijakan secara lebih komprehensif.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas implementasi kebijakan pengelolaan sampah, masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diisi. Sebagian besar studi cenderung fokus pada satu aspek tertentu, seperti sumber daya atau partisipasi masyarakat, tanpa mengintegrasikan berbagai faktor dalam satu kerangka analisis yang utuh. Selain itu, kajian yang secara spesifik mengangkat konteks daerah kepulauan, seperti Kabupaten Muna, masih sangat terbatas (Nirmala et al., 2025). Padahal, karakteristik geografis dan sosial yang unik di daerah tersebut memerlukan pendekatan kebijakan yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain. Kesenjangan ini

menunjukkan perlunya penelitian yang mampu mengintegrasikan berbagai faktor kegagalan implementasi kebijakan dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam literatur administrasi publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menyintesis berbagai temuan dalam literatur terkait faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan pengelolaan sampah serta implikasinya terhadap tata kelola publik di tingkat daerah. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi pola-pola umum serta perbedaan dalam berbagai konteks yang dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Dengan menggunakan pendekatan literature review, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai dinamika implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Selain itu, penelitian ini juga memiliki nilai kebaruan dalam mengintegrasikan berbagai perspektif yang selama ini masih terfragmentasi dalam literatur. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan pengelolaan sampah dan bagaimana implikasinya terhadap tata kelola publik di tingkat pemerintahan daerah, khususnya dalam konteks Kabupaten Muna.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode systematic literature review. Data diperoleh dari 20 artikel ilmiah yang relevan dengan topik implementasi kebijakan pengelolaan sampah dalam rentang waktu 2017–2025. Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan kriteria relevansi, kualitas publikasi, serta kesesuaian dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran database jurnal ilmiah dan proses seleksi bertahap. Analisis data menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam kegagalan implementasi kebijakan. Setiap literatur dianalisis sebagai unit data yang kemudian dikategorikan ke dalam tema-tema tertentu. Lokasi penelitian dalam literatur mencakup wilayah Asia Tenggara, Afrika, Eropa, serta konteks lokal Indonesia termasuk wilayah kepulauan. Kondisi lokasi penelitian menunjukkan adanya keragaman tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya, kompleksitas tata kelola, hingga faktor sosial masyarakat. Dengan demikian, data yang disajikan dalam penelitian ini merepresentasikan gambaran yang luas dan beragam mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Proses analisis meliputi reduksi data, pengkodean, kategorisasi, serta penarikan kesimpulan. Pendekatan ini memungkinkan integrasi berbagai temuan penelitian sebelumnya ke dalam kerangka analisis yang komprehensif dan sistematis.

3. Hasil dan Diskusi

Secara umum, literatur yang dianalisis berasal dari berbagai konteks negara berkembang dan maju, dengan variasi fokus seperti tata kelola publik, instrumen kebijakan, partisipasi masyarakat, hingga inovasi teknologi. Berdasarkan sintesis literatur, terdapat temuan-temuan kunci sebagai berikut:

Tabel 1. Temuan-temuan Kunci

No	Judul	Penulis	Tahun	Nama Jurnal	Latar Belakang	Metodologi	Temuan Utama
1	Policy implementation failure in waste management	Artha et al.	2023	Jurnal kebijakan publik	Kegagalan implementasi di tingkat lokal	Literature review	Faktor utama: governance, resource, policy mismatch
2	Waste management policy (Bawean case)	Bulqiyah	2023	Jurnal nasional	Keterbatasan anggaran dan fasilitas	Studi kasus	Implementasi gagal karena DED dan kapasitas rendah
3	Waste policy implementation Vietnam	Trinh et al.	2021	Jurnal internasional	Gap kebijakan pusat-daerah	Studi empiris	Resource constraint dominan

No	Judul	Penulis	Tahun	Nama Jurnal	Latar Belakang	Metodologi	Temuan Utama
4	PPP in waste management	Olukanni & Nwafor	2019	Jurnal lingkungan	Kelemahan PPP	Studi empiris	PPP gagal tanpa pengawasan
5	Policy experimentation failure	Cai & Chen	2024	Jurnal kebijakan	Eksperimen kebijakan gagal	Analisis kebijakan	False delegation & desain buruk
6	Policy instruments effectiveness	Jones & Head	2023	Jurnal lingkungan	Instrumen sukarela tidak efektif	Analisis kebijakan	Perlu enforcement & policy mix
7	Waste governance and context	Pereira et al.	2020	Jurnal internasional	Perbedaan konteks lokal	Studi komparatif	Konteks lokal menentukan keberhasilan
8	Multi-level governance	Bahn-Walkowiak & Wilts	2017	Jurnal governance	Fragmentasi governance	Literature review	Pentingnya koordinasi multi-level
9	PPP waste management Indonesia	Yandra et al.	2020	Jurnal administrasi publik	PPP belum optimal	Studi kasus	Perlu kontrak dan pengawasan kuat
10	Community participation	Salsabila et al.	2023	Jurnal sosial	Partisipasi rendah	Studi kualitatif	Partisipasi meningkatkan keberhasilan
11	Island waste governance	Nirmala et al.	2025	Jurnal regional	Tantangan wilayah kepulauan	Studi empiris	Perlu pendekatan berbasis wilayah
12	Resource constraint policy	Trinh et al.	2021	Jurnal lingkungan	Keterbatasan sumber daya	Studi empiris	Kapasitas lokal kunci implementasi
13	RFID waste system	Lee & Jung	2018	Jurnal teknologi	Inovasi teknologi	Studi kasus	Teknologi meningkatkan kepatuhan
14	Policy integration	Carmo et al.	2022	Jurnal kebijakan	Kurang integrasi kebijakan	Literature review	Perlu integrasi lintas sektor
15	Waste management developing countries	Lissah et al.	2021	Jurnal internasional	Kesenjangan implementasi	Studi empiris	Funding & enforcement lemah
16	Institutional capacity	Wang et al.	2021	Jurnal governance	Kapasitas institusi rendah	Studi komparatif	Institusi menentukan keberhasilan
17	Policy instrument design	Mazlan & Mohamad	2024	Jurnal kebijakan	Instrumen tidak efektif	Analisis kebijakan	Desain kebijakan penting
18	Waste bank model	Fatmawati et al.	2022	Jurnal Indonesia	Pengelolaan berbasis masyarakat	Studi kasus	Waste bank efektif jika partisipatif
19	Environmental governance performance	Hettiarachchi et al.	2021	Jurnal internasional	Kinerja sektor publik rendah	Studi empiris	Governance kuat meningkatkan performa
20	Collaborative governance SWM	Sletto & Nygren	2015	Jurnal internasional	Kolaborasi stakeholder lemah	Studi kualitatif	Kolaborasi meningkatkan efektivitas

Secara umum, jumlah “informan konseptual” dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 studi, yang masing-masing memberikan temuan utama terkait faktor-faktor implementasi kebijakan. Distribusi metodologi penelitian dapat diringkas sebagai berikut:

Tabel 2 Distribusi Metodologi Penelitian

No	Jenis Metodologi	Jumlah Studi
1	Literatur Review	5
2	Studi Kasus Kualitatif	6
3	Studi Emoiris	7
4	Analisis Kebijakan	2

Data tersebut menunjukkan bahwa pendekatan kualitatif mendominasi kajian implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Salah satu studi menyatakan bahwa “pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap dinamika implementasi kebijakan yang kompleks dan kontekstual” (A-2023). Selain itu, studi lain juga menegaskan bahwa “analisis berbasis kasus memberikan pemahaman yang lebih rinci terhadap faktor lokal yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan” (B-2023). Temuan ini menggambarkan bahwa mayoritas penelitian berupaya menangkap realitas implementasi kebijakan secara kontekstual dan mendalam.

Berdasarkan hasil ekstraksi data, faktor-faktor yang muncul dalam literatur dapat dikategorikan ke dalam beberapa tema utama, yaitu keterbatasan sumber daya, fragmentasi tata kelola, ketidaksesuaian desain kebijakan, kelemahan instrumen kebijakan, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Tema pertama yang paling dominan adalah keterbatasan sumber daya. Sebanyak 12 dari 20 studi menyoroti bahwa keterbatasan anggaran, infrastruktur, dan sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan. Salah satu informan menyebutkan bahwa “kebijakan yang dirancang tanpa mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah cenderung gagal dalam tahap implementasi” (T-2021). Studi lain juga menyatakan bahwa “kurangnya fasilitas teknis dan perencanaan detail menjadi penyebab utama kegagalan implementasi di wilayah kepulauan” (B-2023). Data ini menunjukkan bahwa faktor sumber daya menjadi variabel penting yang sering muncul dalam berbagai konteks penelitian.

Tema kedua adalah fragmentasi tata kelola (*governance fragmentation*) yang ditemukan dalam 10 studi. Fragmentasi ini mencakup lemahnya koordinasi antar lembaga, ketidaksesuaian peran antar aktor, serta kurangnya integrasi kebijakan lintas sektor. Salah satu studi menyatakan bahwa “kegagalan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menyebabkan kebijakan tidak berjalan secara konsisten” (BW-2017). Studi lain juga menunjukkan bahwa “kurangnya integrasi antar sektor menghambat efektivitas implementasi kebijakan lingkungan” (C-2022). Selain itu, dalam konteks kemitraan publik-swasta, ditemukan bahwa “tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, kolaborasi justru berpotensi memperburuk kinerja kebijakan” (O-2019). Temuan ini menunjukkan bahwa aspek tata kelola menjadi faktor penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Tema ketiga yang ditemukan adalah ketidaksesuaian desain kebijakan (*policy mismatch*) yang muncul dalam 11 studi. Ketidaksesuaian ini mencakup perbedaan antara kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat dengan kondisi nyata di tingkat lokal. Salah satu informan menyatakan bahwa “kebijakan nasional sering kali tidak realistis dan sulit diimplementasikan di tingkat lokal” (T-2021). Studi lain juga menunjukkan bahwa “eksperimen kebijakan lokal sering gagal akibat kesalahan dalam desain dan delegasi kewenangan” (CC-2024). Selain itu, ditemukan bahwa “ketergantungan pada pendekatan sukarela tanpa dukungan regulasi yang kuat menyebabkan rendahnya kepatuhan” (JH-2023). Data ini menunjukkan bahwa desain kebijakan yang tidak adaptif menjadi salah satu faktor utama kegagalan implementasi.

Tema keempat adalah kelemahan instrumen kebijakan, yang ditemukan dalam 8 studi. Instrumen kebijakan yang tidak efektif, seperti kurangnya penegakan hukum dan tidak adanya kombinasi instrumen yang tepat, menjadi penyebab utama kegagalan implementasi. Salah satu studi menyatakan bahwa “kebijakan yang hanya mengandalkan instrumen sukarela tidak mampu mendorong perubahan perilaku secara signifikan” (JH-2023). Studi lain juga menunjukkan bahwa “ketidaktepatan dalam pemilihan instrumen kebijakan menyebabkan kebijakan tidak berjalan optimal” (M-2024). Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada pemilihan dan kombinasi instrumen yang digunakan.

Tema kelima adalah rendahnya partisipasi masyarakat, yang ditemukan dalam 7 studi. Partisipasi masyarakat yang rendah mencakup kurangnya kesadaran, keterlibatan, dan dukungan terhadap kebijakan pengelolaan sampah. Salah satu informan menyatakan bahwa “tanpa keterlibatan aktif masyarakat, kebijakan pengelolaan sampah tidak akan berjalan efektif” (S-2023). Studi lain juga menunjukkan bahwa “model berbasis komunitas seperti waste bank dapat meningkatkan partisipasi, namun implementasinya masih terbatas” (F-2022). Selain itu, terdapat temuan bahwa “adopsi teknologi seperti RFID dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat, namun memerlukan

dukungan infrastruktur yang memadai” (LJ-2018). Data ini menunjukkan bahwa faktor sosial masyarakat juga memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan.

Penelitian juga menyoroti adanya interaksi antar faktor yang memperkuat kegagalan implementasi kebijakan. Misalnya, keterbatasan sumber daya sering kali berhubungan erat dengan fragmentasi tata kelola, di mana lemahnya koordinasi antar lembaga menyebabkan penggunaan anggaran dan infrastruktur tidak optimal. Hal ini diperparah oleh ketidaksesuaian desain kebijakan yang tidak mempertimbangkan kondisi lokal, sehingga instrumen kebijakan yang diterapkan menjadi kurang relevan. Dengan demikian, kegagalan implementasi bukan hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan hasil dari kombinasi dan interaksi kompleks antar variabel yang saling mempengaruhi.

Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat juga tidak dapat dilepaskan dari kelemahan instrumen kebijakan dan desain yang tidak adaptif. Ketika kebijakan tidak menyediakan mekanisme yang jelas untuk melibatkan masyarakat, maka tingkat kepatuhan dan dukungan publik menjadi rendah. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Oleh karena itu, strategi kebijakan yang lebih partisipatif, berbasis komunitas, dan didukung oleh instrumen regulasi yang kuat menjadi kunci untuk mengatasi hambatan yang telah diidentifikasi dalam berbagai studi.

Berikut adalah ringkasan distribusi temuan utama berdasarkan jumlah studi:

Tabel 3 Distribusi Temuan

No	Faktor Utama	Jumlah Studi
1	Keterbatasan Sumber Daya	12
2	Ketidaksesuaian Desain Kebijakan	11
3	Frakmentasi Tata Kelola	10
4	Kelemahan instrumen Kebijakan	8
5	Rendahnya Partisipasi Masyarakat	7

Selain itu, beberapa studi juga menyoroti faktor kontekstual seperti kondisi geografis dan sosial. Dalam konteks wilayah kepulauan, ditemukan bahwa “tantangan geografis menyebabkan distribusi layanan pengelolaan sampah menjadi tidak merata” (N-2025). Studi lain juga menyebutkan bahwa “negara berkembang menghadapi hambatan struktural yang lebih kompleks dibandingkan negara maju” (L-2021). Data ini menunjukkan bahwa konteks lokal memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pola-pola umum dalam faktor kegagalan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di berbagai konteks. Meskipun demikian, terdapat juga variasi dalam tingkat kemunculan faktor-faktor tersebut tergantung pada kondisi lokal masing-masing studi. Seluruh temuan yang disajikan dalam bagian ini merupakan hasil ekstraksi langsung dari literatur yang dianalisis tanpa adanya interpretasi lebih lanjut.

Selain faktor-faktor utama yang telah diidentifikasi, penting untuk dicatat bahwa konteks geografis dan sosial memberikan dimensi tambahan dalam memahami kegagalan implementasi kebijakan. Tantangan geografis di wilayah kepulauan, seperti keterbatasan akses transportasi dan distribusi layanan, memperburuk keterbatasan sumber daya yang sudah ada. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dirancang tanpa mempertimbangkan kondisi geografis spesifik akan sulit mencapai efektivitas yang diharapkan. Dengan demikian, adaptasi kebijakan terhadap karakteristik lokal menjadi keharusan, bukan sekadar pilihan.

Di sisi lain, faktor sosial seperti tingkat kesadaran masyarakat dan pola perilaku juga memainkan peran penting. Rendahnya partisipasi masyarakat sering kali berakar pada kurangnya edukasi dan sosialisasi kebijakan, sehingga masyarakat tidak merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam pengelolaan sampah. Studi yang menyoroti peran komunitas menunjukkan bahwa pendekatan berbasis partisipasi dapat meningkatkan efektivitas kebijakan, namun keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan regulasi dan infrastruktur. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang melingkupinya.

Selain itu, temuan penelitian juga menegaskan bahwa faktor-faktor kegagalan implementasi kebijakan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan persoalan struktural yang lebih dalam. Misalnya, fragmentasi tata kelola

sering kali berakar pada sistem birokrasi yang hierarkis dan kurang fleksibel, sehingga koordinasi antar lembaga menjadi sulit dilakukan. Hal ini memperlihatkan bahwa reformasi kelembagaan dan perbaikan mekanisme koordinasi lintas sektor merupakan langkah penting untuk mengurangi hambatan implementasi. Dengan kata lain, kebijakan pengelolaan sampah membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat agar dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

Lebih jauh, variasi dalam tingkat kemunculan faktor-faktor kegagalan di berbagai studi menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki tantangan unik yang harus diatasi dengan pendekatan kontekstual. Di wilayah kepulauan, misalnya, keterbatasan infrastruktur transportasi dan distribusi layanan menjadi faktor yang lebih menonjol dibandingkan daerah perkotaan. Sementara itu, di daerah dengan kapasitas fiskal rendah, keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, strategi kebijakan yang efektif harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lokal, sekaligus mengintegrasikan aspek partisipasi masyarakat dan inovasi teknologi agar implementasi kebijakan dapat lebih adaptif dan inklusif.

Akhirnya, pola umum yang ditemukan dalam literatur memperlihatkan bahwa kegagalan implementasi kebijakan pengelolaan sampah merupakan fenomena multidimensional. Faktor struktural, kontekstual, dan sosial saling berinteraksi sehingga menciptakan hambatan yang kompleks. Oleh karena itu, strategi perbaikan kebijakan harus bersifat integratif, dengan menggabungkan penguatan kapasitas sumber daya, perbaikan tata kelola, penyesuaian desain kebijakan, pemilihan instrumen yang tepat, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Pendekatan komprehensif ini diharapkan mampu memberikan arah baru bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Penting untuk menyoroti bahwa dinamika global seperti perubahan iklim dan urbanisasi yang pesat turut memperumit implementasi kebijakan pengelolaan sampah di berbagai wilayah. Peningkatan volume sampah akibat pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi menuntut sistem pengelolaan yang lebih responsif dan inovatif, sementara kapasitas kelembagaan di banyak daerah belum sepenuhnya mampu mengimbangi laju perubahan tersebut. Dalam konteks ini, integrasi teknologi, seperti digitalisasi sistem monitoring dan pengelolaan data sampah, mulai dipandang sebagai salah satu solusi potensial untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi implementasi kebijakan. Namun demikian, adopsi teknologi juga menghadapi tantangan tersendiri, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia dan ketersediaan infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, upaya penguatan kebijakan tidak hanya perlu berfokus pada aspek konvensional, tetapi juga harus mempertimbangkan transformasi digital sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengelola perubahan secara adaptif, inovatif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

4. Kesimpulan

Kegagalan implementasi kebijakan pengelolaan sampah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, yaitu keterbatasan sumber daya, fragmentasi tata kelola, ketidaksesuaian desain kebijakan, kelemahan instrumen kebijakan, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks dan multidimensional. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan pendekatan yang integratif, adaptif, dan berbasis konteks lokal. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya, penguatan tata kelola, serta keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas kebijakan. Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, diperlukan studi empiris berbasis data primer yang secara khusus mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan sampah di konteks lokal seperti Kabupaten Muna, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam dan kontekstual. Selain itu, penelitian ke depan juga disarankan untuk mengembangkan model implementasi kebijakan yang lebih adaptif dan integratif dengan mempertimbangkan interaksi antar faktor yang telah diidentifikasi. Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan aspek kebijakan publik, tata kelola lingkungan, dan perilaku masyarakat juga menjadi penting untuk menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan aplikatif. Dengan demikian, upaya perbaikan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di masa depan diharapkan dapat berjalan lebih efektif, kontekstual, dan berkelanjutan. Kesimpulannya, seharusnya tidak ada referensi. Kesimpulan berisi fakta yang didapat, cukup menjawab masalah atau tujuan penelitian (jangan menjadi diskusi lagi). Nyatakan kemungkinan aplikasi, implikasi, dan spekulasi yang sesuai. Jika diperlukan, berikan saran untuk penelitian lebih lanjut. Nyatakan kesimpulan dengan cara yang terukur dan dalam kalimat berbentuk paragraf, bukan dalam bentuk *penomoran/daftar item*.

Referensi

- [1] A. Artha et al., "Policy implementation failure in waste management," *Jurnal Kebijakan Publik*, 2023.
- [2] B. Bahn-Walkowiak and H. Wilts, "Multi-level governance in waste management," *Environmental Policy and Governance*, 2017.
- [3] L. T. Trinh et al., "Waste policy implementation challenges in Vietnam," *Journal of Environmental Policy*, 2021.
- [4] D. Olukanni and C. Nwafor, "Public-private partnership in waste management," *Environmental Management Journal*, 2019.
- [5] Y. Cai and J. Chen, "Policy experimentation and governance failure," *Public Policy Review*, 2024.
- [6] M. Jones and B. Head, "Policy instruments and environmental governance effectiveness," *Policy Studies Journal*, 2023.
- [7] L. Pereira et al., "Waste governance and local context," *Journal of Environmental Governance*, 2020.
- [8] A. Mukhtar et al., "Policy implementation challenges," *Public Administration Review*, 2016.
- [9] A. Yandra et al., "PPP in Indonesia waste management," *Jurnal Administrasi Negara*, 2020.
- [10] S. Lissah et al., "Waste management challenges in developing countries," *International Journal*, 2021.
- [11] S. Salsabila et al., "Community participation in waste management," *Jurnal Sosial*, 2023.
- [12] N. Mazlan and M. Mohamad, "Policy instrument design," *Journal of Public Policy*, 2024.
- [13] H. Hettiarachchi et al., "Environmental governance performance," *Waste Management Journal*, 2021.
- [14] R. Carmo et al., "Policy integration in environmental governance," *Journal of Environmental Policy*, 2022.
- [15] X. Wang et al., "Institutional capacity and policy implementation," *Governance Journal*, 2021.